



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun secara sistematis sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun, disadari juga bahwa dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Pangkalpinang, Mei 2025

Pt. KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YUDI SUHASRI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700605 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDMD.....	III-1
3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	III-2
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	III-2
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. Triwulan I Program/Kegiatan BKPSDMD Tahun 2025	II-7
Tabel 2.2	Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD s.d Triwulan I Tahun 2025	II-10
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja BKPSDMD Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	III-3

**1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tahun 2025 telah disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Implementasi Renja BKPSDMD tahun 2025 telah berlangsung selama 1 (satu) Triwulan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kerangka ekonomi daerah.

Perencanaan yang baik adalah langkah awal mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDMD yang telah ditetapkan, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 guna menyesuaikan terhadap aturan baru saat ini serta kondisi yang berkembang baik internal maupun eksternal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renja, yaitu:

1. Ketidaksesuaian antara asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program

- dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya penyesuaian pada target, sasaran, serta hal-hal penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 nomor 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 14 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 nomor 11 seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah tahun 2022 nomor 16 seri E).
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 seri A).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam upaya mendukung program prioritas daerah.

Perubahan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2025;
- b. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang akan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat capaian kinerja RENSTRA dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan

yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.30.662.979.613,00.

Hasil evaluasi program sampai dengan bulan Maret Tahun 2025, rata-rata realisasi fisik capaian program/kegiatan/subkegiatan sebesar 14,55% dan keuangan sebesar 13,95% atau sebesar Rp.4.278.276.972,00. Capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi kinerja anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan bulan Maret tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp.4.218.757.586,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.23.884.798.507,00 atau 17,66% dengan realisasi fisik sebesar 17,95%.

2. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi kinerja anggaran pada Program Kepegawaian Daerah sampai dengan bulan Maret tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp.57.019.386,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.451.821.338,00 atau 2,33% dengan realisasi fisik sebesar 5,04%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi kinerja anggaran pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Maret tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.4.326.359.768,00 atau 0,06% dengan realisasi fisik sebesar 1,19%.

Adapun capaian kinerja anggaran dan fisik kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan ini secara fisik terealisasi 6,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.575.000,00 atau 1,56%.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, secara fisik terealisasi 17,71% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.200.889.738,00 atau 17,71%. Secara khusus tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Secara fisik kegiatan ini terealisasi 19,09% dan realisasi keuangan sebesar Rp.77.503.831,00 atau 12,70%.
 - 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Secara fisik kegiatan ini terealisasi 28,89% dan realisasi keuangan sebesar Rp.870.984.017,00 atau 28,89%.
 - 1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Secara fisik realisasi kegiatan ini yakni 4,35%, realisasi keuangan yaitu Rp.65.805.000,00 atau 3,37%.
2. Program Kepegawaian Daerah
 - 2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 1,12% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.094.432,00 atau 1,08%.
 - 2.2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 8,56% dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.820.000,00 atau 6,19%.
 - 2.3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 6,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.157.954,00 atau 1,29%.
 - 2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 2,87% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.947.000,00 atau 2,61%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
Pada kegiatan ini realisasi fisik sebesar 5,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.500.000,00 atau 0,24%.
 - 3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Pada kegiatan ini realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0%.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. bulan Maret
Program/Kegiatan BKPSDMD Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN INDUK (RP)	REALISASI KEUANGAN s.d. MARET (RP)	PERSENTASE REALISASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	TOTAL BELANJA	Rp 30.662.979.613	Rp 5.280.413.310	17,22	17,82
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 23.884.798.507	Rp 5.220.893.924	21,86	22,14
I	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 229.682.100	Rp 3.575.000	1,56	6,03
1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 192.000.600	Rp 3.575.000	1,86	5,00
2	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 17.442.700	Rp -	0,00	7,00
3	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.238.800	Rp -	0,00	15,00
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 18.078.026.952	Rp 4.203.026.076	23,25	23,25
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 18.078.026.952	Rp 4.203.026.076	23,25	23,25
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 610.235.800	Rp 77.503.831	12,70	19,09
1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 119.998.000	Rp -	0,00	15,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 29.962.100	Rp -	0,00	15,00
3	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 63.982.200	Rp 16.589.600	25,93	27,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 12.300.000	Rp 810.000	6,59	10,00
5	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp 189.993.500	Rp 55.846.200	29,39	35,00
6	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 14.000.000	Rp -	0,00	0,00
7	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 180.000.000	Rp 4.258.031	2,37	5,00
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.015.251.000	Rp 870.984.017	28,89	28,89
1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 14.993.000	Rp -	0,00	0,00
2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 500.000.000	Rp 77.881.517	15,58	15,58
3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.500.258.000	Rp 793.102.500	31,72	31,72
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.951.602.655	Rp 65.805.000	3,37	4,35
1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 199.781.600	Rp 35.630.000	17,83	20,00
2	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.452.051.755	Rp -	0,00	0,00
3	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 299.769.300	Rp 30.175.000	10,07	15,00

2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.451.821.338	Rp 57.019.386	2,33	5,04
I	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 659.678.760	Rp 7.094.432	1,08	1,12
1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp 30.661.860	Rp -	0,00	0,00
2	Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 113.329.100	Rp 7.094.432	6,26	6,50
3	Subkegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Rp 13.348.100	Rp -	0,00	0,00
4	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 27.651.200	Rp -	0,00	0,00
5	Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 337.288.620	Rp -	0,00	0,00
6	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 77.315.000	Rp -	0,00	0,00
7	Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 60.084.880	Rp -	0,00	0,00
II	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 465.499.778	Rp 28.820.000	6,19	8,56
1	Subkegiatan Pengelolaan Assessment Center	Rp 169.356.300	Rp 820.000	0,48	5,00
2	Subkegiatan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 58.182.898	Rp -	0,00	0,00
3	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Rp 209.094.980	Rp 28.000.000	13,39	15,00
4	Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 28.865.600	Rp -	0,00	0,00
III	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp 1.022.601.300	Rp 13.157.954	1,29	6,60
1	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 125.615.300	Rp -	0,00	10,00
2	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 101.230.300	Rp -	0,00	15,00
3	Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Rp 795.755.700	Rp 13.157.954	1,65	5,00
IV	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 304.041.500	Rp 7.947.000	2,61	2,87
1	Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 61.412.200	Rp -	0,00	0,00
2	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 154.997.700	Rp -	0,00	0,00
3	Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp 21.795.600	Rp -	0,00	0,00
4	Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 34.889.600	Rp 7.947.000	22,78	25,00
5	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 30.946.400	Rp -	0,00	0,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 4.326.359.768	Rp 2.500.000	0,06	1,19
I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 1.026.101.735	Rp 2.500.000	0,24	5,00
1	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.026.101.735	Rp 2.500.000	0,24	5,00
II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 3.300.258.033	Rp -	0,00	0,00
1	Subkegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri Provinsi	Rp 16.393.000	Rp -	0,00	0,00
2	Subkegiatan Sertifikasi Kompetensi di	Rp 48.595.129	Rp -	0,00	0,00

	Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota					
3	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Rp 125.840.000	Rp -	0,00	0,00	
4	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Rp 12.897.000	Rp -	0,00	0,00	
5	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 2.912.661.204	Rp -	0,00	0,00	
6	Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 183.871.700	Rp -	0,00	0,00	

Tabel 2.2
Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan	Target Restra SKPD pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.										
				5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1			URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI								Rp	5.280.413.310	Rp	5.280.413.310																	
	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			Rp	21.397.443.589	Rp	23.884.798.507	Rp	5.220.893.924	Rp	5.220.893.924					21,86												
				Nilai Sakkp PD	82,75	-	80,20	Rp	164.655.064	82,50	Rp	229.682.100	-	Rp	3.575.000	0	Rp	3.575.000	0	1,56	80,20	Rp	168.230.064	96,92	#DIV/0!	BKPSDMD					
	5	03	01	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD (Dokumen)	7	0	7	Rp	164.655.064	7	Rp	229.682.100	0	Rp	3.575.000	0	Rp	3.575.000	0	1,56	7	Rp	168.230.064	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2	Rp	128.912.581	2	Rp	192.000.600	0	Rp	3.575.000	0	Rp	3.575.000	0	1,86	2	Rp	132.487.581	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (Dokumen)	1		1	Rp	2.585.650	1	Rp	17.442.700	0	0	Rp	-	0	0	-	-	1	Rp	2.585.650	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (DALEV, LAKIP, LPKD dan ATA) (Laporan)	4		4	Rp	33.156.833	4	Rp	20.238.800	0	0	Rp	-	0	0	-	4	Rp	33.156.833	100	#DIV/0!	BKPSDMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0,00	1,56																
Predikat Kinerja														SR	SR																
						Survei Kepuasan Pelayanan Internal		71	-	71	Rp	21.232.788.525	72	Rp	23.655.116.407		Rp	5.217.318.924	0	Rp	5.217.318.924	0	22,06	71	Rp	26.450.107.449	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.02	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Nilai)	71	-	71	Rp	16.558.335.186	72	Rp	18.078.026.952		Rp	4.203.026.076	0	Rp	4.203.026.076	0	23,25	71	Rp	20.761.361.262	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	101		94	Rp	16.558.335.186	95	Rp	18.078.026.952	91	Rp	4.203.026.076	91	Rp	4.203.026.076	95,79	23,25	185	Rp	20.761.361.262	183	#DIV/0!	BKPSDMD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														95,79	23,25																
Predikat Kinerja														SR	SR																
	5	03	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDMD) (Nilai)	71	0	71	Rp	574.816.814	72	Rp	610.235.800		Rp	77.503.831	0	Rp	77.503.831	0,00	12,70	71	Rp	652.320.645	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	1	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	30		30	Rp	118.887.000	30	Rp	119.998.000	30	Rp	-	30	Rp	-	100	0,00	60	Rp	118.887.000	200	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Paket)	7		7	Rp	22.062.200	7	Rp	29.962.100	7	Rp	-	7	Rp	-	100	0,00	14	Rp	22.062.200	200	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak (Paket)	20		20	Rp	46.875.200	20	Rp	63.982.200	20	Rp	16.589.600	20	Rp	16.589.600	100	25,93	40	Rp	63.464.800	200	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	3		3	Rp	4.310.000	3	Rp	12.300.000	0	Rp	810.000	0	Rp	810.000	0	6,59	3	Rp	5.120.000	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		5	Rp	178.342.100	5	Rp	189.993.500	5	Rp	55.846.200	5	Rp	55.846.200	100	29,39	10	Rp	234.188.300	200	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu (Laporan)	12		12	Rp	13.946.800	12	Rp	14.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	0,00	12	Rp	13.946.800	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
	5	03	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12	Rp	190.393.514	12	Rp	180.000.000	0	Rp	4.258.031	0	Rp	4.258.031	0	2,37	12	Rp	194.651.545	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														66,19	12,70																
Predikat Kinerja														S	SR																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.						
				5		6		7		8		12=8+9+10+11		14=6 + 12		15 = 14/5x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1																											
			Sub Kegiatan Perumusan Bahan Keputusan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)		0	Rp	-	12	Rp	13.348.100	0	-	0	0,00	0	0	0,00	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDMD				
5	03	02	1.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	12	Rp	23.407.443	12	Rp	27.651.200	0	-	0	0,00	0	0,00	1,00	Rp	23.407.443	8,33	#DIV/0!	BKPSDMD			
5	03	02	1.01	08	Subkegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	Rp	1.000.000.000	1	Rp	423.482.402	0	-	0	0,00	0	0,00	1,00	Rp	423.482.402	100,00	42,35	BKPSDMD			
5	03	02	1.01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	Rp	55.971.188	1	Rp	77.315.000	0	-	0	0,00	0	0,00	1,00	Rp	55.971.188	8,33	#DIV/0!	BKPSDMD			
5	03	02	1.01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	12	Rp	44.775.000	1	Rp	60.084.880	0	-	0	0,00	0	0,00	1,00	Rp	44.775.000	8,33	#DIV/0!	BKPSDMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0,00	1,08												
Predikat Kinerja														SR	SR												
					Persentase pemuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	97%		104,16%	Rp	373.295.219	96%	Rp	1.022.601.300	0	13.157.954,00	0,00%	Rp	13.157.954	0,00	1,29	1,04	Rp	386.453.173	107,38	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	03	02	1.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang diklolel Naikna Pangkat (Orang)	1.195	-	1.167	Rp	86.969.652	1190	Rp	101.230.300	103	-	103	0	8,66	0,00	1.270,00	Rp	86.969.652	106,28	#DIV/0!	BKPSDMD	
					Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi (Orang)	345		281	Rp	286.325.567	340	Rp	921.371.000	0	13.157.954,00	0	13.157.954	0	1,43	281,00	Rp	299.483.521	81,45	#DIV/0!	BKPSDMD		
5	03	01	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	1	Rp	82.402.400	1	Rp	125.615.300	0	-	0	0,00	0	#DIV/0!	662,00	Rp	82.402.400	66.200,00	#DIV/0!	BKPSDMD			
5	03	01	1.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat (Laporan)	1	Rp	86.969.652	1	Rp	101.230.300	-	0	0	0,00	0	0,00	1,00	Rp	86.969.652	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD			
5	03	02	1.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	Rp	203.923.167	1	Rp	795.755.700	0	Rp	13.157.954	0	Rp	13.157.954	0	1,65	1,00	Rp	217.081.121	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0,00	1,29												
Predikat Kinerja														SR	SR												
					Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	31,04%		22%	Rp	391.749.889	28,89%	Rp	465.499.778		28.820.000,00	0,00%	Rp	28.820.000									
5	03	02	1.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1665	4.183.869.629	1404	Rp	391.749.889	1545,00	Rp	465.499.778		28.820.000,00	0	Rp	28.820.000	0	6,19	1.404	Rp	420.569.889	84,32	10,05	BKPSDMD
5	03	02	1.03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1	Rp	139.952.523	1	Rp	169.356.300	Rp	820.000	0	Rp	820.000	0	0,48	1	Rp	140.772.523	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
5	03	02	1.03	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	Rp	50.722.137	1	Rp	58.182.898	Rp	-	0	Rp	-	0	0,00	1	Rp	50.722.137	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
5	03	02	1.03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1	Rp	193.218.193	1	Rp	209.094.980	Rp	28.000.000	0	Rp	28.000.000	0	13,39	1	Rp	305.628.407	100	#DIV/0!	BKPSDMD		
5	03	02	1.03	13	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (Orang)	500	Rp	7.857.036	500	Rp	28.865.600	85	-	85	Rp	-	17	0,00	347	Rp	7.857.036	69,40	#DIV/0!	BKPSDMD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														1,05	6,19												
Predikat Kinerja														SR	SR												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.								
				5		6		7		8		12-8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				Persentase ASN yang Memiliki Kinerja dan Disiplin Minimal Baik	99,91%		1,00	Rp	184.028.825	99,89%	Rp	304.041.500		Rp	7.947.000	0%	Rp	7.947.000	100	2,61	1,00	Rp	191.975.825	99,92	#DIV/0!	BKPSDMD			
5	03	02	1.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina (Orang)	5360	625.000.000,00	2513	Rp	184.028.825	5360	Rp	304.041.500	0	Rp	7.947.000	0	Rp	7.947.000	0	2,61	2.513,00	Rp	191.975.825	46,88	30,72	BKPSDMD		
5	03	02	1.04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		Rp	47.296.800	1	Rp	61.412.200	-		Rp	-		Rp	-	0	0,00	1	Rp	47.296.800	100	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	03	02	1.04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	3		Rp	19.011.000	5	Rp	154.997.700	0		Rp	-		Rp	-	0	0,00	12	Rp	19.011.000	400	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	03	02	1.04	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	650		Rp	34.819.401	640	Rp	21.795.600	-		Rp	-		Rp	-	0	0,00	697	Rp	34.819.401	107,23	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	03	02	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	3000		Rp	64.233.624	2800	Rp	34.889.600	481	Rp	7.947.000	481	Rp	7.947.000	17,18	22,78	2.994	Rp	72.180.624	99,80	#DIV/0!	BKPSDMD		
5	03	02	1.04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	7		Rp	18.668.000	7	Rp	30.946.400	0		Rp	-		Rp	-	0	0,00	3	Rp	18.668.000	42,86	#DIV/0!	BKPSDMD	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		1,97	2,61												
														Predikat Kinerja		SR	SR												
3				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	85%		Rp	2.315.240.937	80%	Rp	4.326.359.768		Rp	2.500.000	0		Rp	2.500.000,00	0	0,06	0	Rp	2.317.740.937	0,00				
5	04	02	1.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis (Orang)	3926	Rp	4.775.250.000	666	Rp	356.597.527	3668	Rp	1.026.101.735	0	Rp	2.500.000	0	Rp	2.500.000,00	0	0,24	666	Rp	359.097.527	16,96	7,52	BKPSDMD
5	04	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Asn yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	3926		Rp	356.597.527	3668,00	Rp	1.026.101.735	0	Rp	2.500.000	0		Rp	2.500.000,00	0	0,24	666	Rp	359.097.527	16,96	#DIV/0!	BKPSDMD	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,24												
														Predikat Kinerja		SR	SR												
5	04	02	1.01		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional (Orang)	630,00		Rp	15.200.000.000	841,00	Rp	1.919.531.750	620,00	Rp	3.096.532.904	0		Rp	-	0	0,00	841,00	Rp	1.919.531.750	133,49	12,63	BKPSDMD	
					Jumlah Sertifikasi Kelembagaan yang Terealisasi (Lembaga)	7		Rp	1.000.000.000	7	Rp	39.111.660	7	Rp	203.725.129		Rp	-		Rp	-	0	0,00	7,00	Rp	39.111.660	100,00	3,91	BKPSDMD
5	04	01	1.01	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi (Dokumen)	1		Rp	2.850.000	7	Rp	16.393.000	0		Rp	-		Rp	-	0	0,00	7,00	Rp	2.850.000	700,00	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	04	02	1.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang)	120		Rp	12.494.000	199	Rp	48.595.129	0		Rp	-		Rp	-	0	0,00	199,00	Rp	12.494.000	165,83	#DIV/0!	BKPSDMD	
5	04	02	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Penguat Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Penguat Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	3		Rp	14.411.560	3	Rp	125.840.000	0		Rp	-		Rp	-	0	0,00	3,00	Rp	111.880.651	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan)	Target Restra SKPD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%) 13=12/7x100%		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%) 15 = 14/5x100%		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.																		
				5		6		7		8		12=8+9+10+11		14=6 + 12		16																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																							
5	04	02	1.02	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen)	1		1	Rp	9.356.100	1	Rp	12.897.000	0		-	0		-	0	0,00	1,00	Rp	9.356.100	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD											
5	04	01	1.01	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	630		841	Rp	1.881.110.750	620	Rp	2.912.661.204	0		-	0		-	0	0,00	633,00	Rp	3.084.245.762	100,48	#DIV/0!	BKPSDMD											
5	04	01	1.01	08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen)	5		5	Rp	38.421.000	5	Rp	183.871.700	0		-	0		-	0	0,00	5,00	Rp	140.019.203	100,00	#DIV/0!	BKPSDMD											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0,00	0,00																											
SR											SR	SR																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																							
											Rp	30.662.979.613																											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											60,27	17,22																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											R	SR																											
<p>Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Memiliki SDM secara kualitas, sarana dan prasarana memadai, suasana kerja kondusif. Ada koordinasi yang baik dengan SKPD di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga lain (BKN, LAN, Kemendagri)</p> <p>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Secara keseluruhan beberapa kegiatan belum bisa terlaksana, terdapat perubahan rencana kegiatan dan prioritas kegiatan menindaklanjuti keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan, melaksanakan terlebih dahulu kegiatan yang prioritas, serta memonitor dan mengevaluasi secara berkala terhadap kegiatan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Perencanaan Program dan Kegiatan yang Dapat Mendukung Program Pembangunan Daerah</p>																																							

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Adapun kegiatan teknis yang telah dilaksanakan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi perkembangan informasi terkait Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
2. Musyawarah Pimpinan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Fasilitasi BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dalam rangka sosialisasi seputar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Pemberian Informasi

Langsung (PIL) bagi pegawai di lingkungan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Rapat Kerja (Raker) KORPRI Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke PNS Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDMD



3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah: "Meningkatkan Profesionalitas Aparatur" dengan indikator kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN. Terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yakni (1) Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur dengan indikator kinerja Persentase ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur; dan (2) Meningkatnya Kompetensi Aparatur dengan indikator kinerja Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan.

Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, hal ini masih sejalan dengan tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2023-2026 dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja BKPSDMD Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Indikator : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Target : 68	1. Meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	Persentase ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur	95,75%
	2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	87%

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja BKPSDMD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat perubahan pergeseran anggaran dan penambahan jumlah pagu anggaran dikarenakan perubahan prioritas kegiatan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tidak ada kegiatan baru yang diusulkan yang semula pada DPA induk sebesar Rp.30.662.979.613,00 menjadi Rp.28.685.141.865,28 atau berkurang sebesar Rp.1.977.837.747,72.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana perubahan dilakukan terhadap seluruh program/kegiatan yakni sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja BKPSDMD Tahun 2025

NO.	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	PENDANAAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
1	2	3	4	5	2	3	4	5
	TOTAL			30.662.979.613,00	TOTAL			28.685.141.865,28
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23.884.798.507,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23.110.670.744,00
		Nilai Sakip PD (BKPSDM)	82,50	229.682.100,00		Nilai Sakip PD (BKPSDM)	82,50	169.092.700,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	229.682.100,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	169.092.700,00
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	192.000.600,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	133.482.100,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	17.442.700,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.736.300,00
c	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	20.238.800,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	19.874.300,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)	72	23.655.116.407,00		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)	72	22.941.578.044,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	72	18.078.026.952,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	72	17.930.778.444,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	18.078.026.952,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	17.930.778.444,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	72	610.235.800,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan	72	507.997.700,00

a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	119.998.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	119.998.000,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	29.962.100,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	29.962.100,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	63.982.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	38.363.100,00
d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	12.300.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	12.300.000,00
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	189.993.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	176.374.500,00
f	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	14.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	14.000.000,00
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	180.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	117.000.000,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3.015.251.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3.160.251.000,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	14.993.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	14.993.000,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	500.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	500.000.000,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.500.258.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.645.258.000,00

5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	10	1.951.602.655,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	10	1.342.550.900,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	199.781.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	151.781.600,00
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.452.051.755,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	891.000.000,00
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	121	299.769.300,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	121	299.769.300,00
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2.451.821.338,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.988.336.334,78
		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	87%	659.678.760,00		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	87%	522.340.845,78
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan	87	184.990.260,00	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan	87	137.302.095,78
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	30.661.860,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	0,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12	113.329.100,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12	109.435.185,18
c	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	12	13.348.100,00	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	12	0,00

d	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	27.651.200,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	27.866.910,60
		Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	337.288.620,00		Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	314.218.750,00
e	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	337.288.620,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	314.218.750,00
		Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat	6358	137.399.880,00		Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat	6358	70.820.000,00
f	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	77.315.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	70.820.000,00
g	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	60.084.880,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	0,00
		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	28,80%	465.499.778,00		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	28,80%	371.021.889,00
2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1545	465.499.778,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1545	371.021.889,00
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	169.356.300,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	116.951.889,00
b	Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	58.182.898,00	Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	55.300.000,00
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	209.094.980,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	190.000.000,00
d	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500	28.865.600,00	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500	8.770.000,00
		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	96%	1.022.601.300,00		Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	96%	945.036.500,00
3	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi	340	921.371.000,00	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi	340	878.323.600,00

a	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	125.615.300,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	82.567.900,00
b	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	795.755.700,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	795.755.700,00
		Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkat	1190	101.230.300,00		Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkat	1190	66.712.900,00
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	101.230.300,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	66.712.900,00
		Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	99,89%	304.041.500,00		Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	99,89%	149.937.100,00
4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina	5360	304.041.500,00	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina	5360	149.937.100,00
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	61.412.200,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	37.172.400,00
b	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	154.997.700,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	28.648.100,00
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	640	21.795.600,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	640	19.795.600,00
d	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2800	34.889.600,00	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2800	33.374.600,00
e	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7	30.946.400,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7	30.946.400,00
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	80%	4.326.359.768,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	80%	3.586.134.786,50
1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	3668	1.026.101.735,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	2000	749.098.735,00

a	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3668	1.026.101.735,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2000	749.098.735,00
2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sertifikasi kelembagaan yang terselesaikan	7	387.596.829,00	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sertifikasi kelembagaan yang terselesaikan	7	256.687.527,50
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1	16.393.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1	16.115.400,00
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120	48.595.129,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120	27.729.777,50
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3	125.840.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3	81.424.000,00
d	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	12.897.000,00	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	8.562.000,00
e	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan	5	183.871.700,00	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan	5	122.856.350,00

	Kepemimpinan, dan Prajabatan	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional	620	2.912.661.204,00		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional	620	2.580.348.524,00
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	620	2.912.661.204,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	620	2.580.348.524,00

BAB IV

PENUTUP



Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 berfungsi sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Namun dalam perjalanannya rencana kerja dapat disesuaikan apabila dibutuhkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menggambarkan rincian perubahan pagu dan target program/kegiatan pada tahun berjalan. Adapun dari segi anggaran di dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025, total pagu anggaran Rp.30.662.979.613,00 diusulkan untuk dikurangi menjadi Rp.28.685.141.865,28 atau berkurang sebesar Rp.1.977.837.747,72 dikarenakan ada pengurangan belanja perjalanan dinas, belanja ATK dan cetak, belanja honorarium, serta belanja pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas sesuai dengan tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Diharapkan dengan perubahan Rencana Kerja, target program/kegiatan pada triwulan II, III dan IV dapat lebih mudah dicapai sehingga pada akhirnya indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja dapat direalisasikan dengan baik.

Pangkalpinang, MEI 2025

Plt. KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YUDI SUHASRI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700605 200003 1 005



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTUNG,
KEL. AIR ITAM, PANGKALPINANG